

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji literatur yang relevan dengan komunikasi keberlanjutan. Pertama – tama, akan dibahas terkait konsep dasar dari keberlanjutan dan hubungannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selanjutnya, pembahasan mengenai komunikasi keberlanjutan dan pendekatan partisipatif. Terakhir, akan diuraikan terkait pentingnya nilai – nilai lokal dalam komunikasi keberlanjutan sebagai upaya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2.1 Keberlanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Keberlanjutan telah berkembang menjadi konsep dengan makna yang luas dan fleksibel, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Istilah ini disebut sebagai “*boundary term*”, yang dinilai efektif dalam menghubungkan berbagai kelompok untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama terkait lingkungan dan pembangunan ekonomi. Saat ini, keberlanjutan menjadi diskusi global yang melibatkan komunitas ilmiah, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan gagasan dan kebijakan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan (Scoones, 2007).

Menurut Godemann & Michelsen (2011), pembahasan mengenai konsep keberlanjutan seringkali disertai dengan ketidakjelasan, ambiguitas, dan terkadang kontradiksi. Meskipun demikian, terdapat pemahaman umum yang diterima mengenai arti pembangunan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam laporan *Our Common Future* atau Laporan Brundtland, yang menyatakan “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri” (WCED, 1987).

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep normatif yang etis yang mengacu pada bentuk ekonomi dan gaya hidup yang tidak membahayakan masa depan (Godemann & Michelsen, 2011). Dalam perkembangannya, gagasan pokok keberlanjutan berfokus pada keseimbangan antara kesejahteraan, lingkungan, dan manusia yang telah dijadikan pedoman untuk masa depan yang berkelanjutan. Konsep ini mencerminkan visi optimis terhadap keberlanjutan sebagai arah yang jelas bagi pembangunan global (Weder *et al.*, 2020). Untuk mewujudkan pembangunan global tersebut, keberlanjutan telah dijadikan tujuan utama oleh pemerintah, LSM dan bisnis bahkan organisasi transnasional, seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), yang telah menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai bagian dari agenda 2030 (Weder *et al.*, 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan panduan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) (Boar *et al.*, 2020). Keistimewaan SDGs dilihat dari penerimaan dan adanya komitmen yang luas di tingkat global, makna pembangunan berkelanjutan yang dinilai komprehensif dapat diukur melalui 232 indikator (Glass & Newig, 2019), dan PBB juga mendefinisikan SDGs sebagai tujuan global yang terpadu dan universal dengan mempertimbangkan realitas, kapasitas, serta kebijakan nasional di masing-masing negara (Boar *et al.*, 2020). Kemunculan tujuan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap masalah global akibat proses globalisasi dan meningkatnya keterhubungan global (Glass & Newig, 2019). Dalam praktiknya, pembangunan berkelanjutan mencakup tanggung jawab terhadap masa depan, pemenuhan kebutuhan global, perlindungan lingkungan, pembangunan sebagai prinsip dasar kehidupan, integrasi ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan, serta partisipasi dan keterlibatan (Weder *et al.*, 2020).

Secara luas, implementasi SDGs memerlukan sistem inovasi global yang adaptif dan terkoordinasi dengan mempertemukan aktor – aktor di bidang penelitian dan masyarakat, serta

mendukung kolaborasi yang selaras dengan konteks lokal. Tanpa adanya dukungan tersebut, SDGs tidak akan berarti apa – apa (Smith *et al.*, 2017). Merujuk pada Bowen *et al.* (2017), tata kelola SDGs sangat diperlukan untuk dapat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tindakan kolektif, memastikan bahwa para pelaku yang terlibat di dalamnya dapat bertanggung jawab dan menangani berbagai dilema yang muncul antara tujuan – tujuan tersebut.

Meskipun SDGs telah dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam mewujudkan keberlanjutan, kompleksitas dan ketidakpastian dalam konsep keberlanjutan sering dianggap sebagai hambatan dalam penerapannya untuk mencapai keberlanjutan yang bermakna (Weder *et al.*, 2020). Istilah keberlanjutan bahkan sering disebut sebagai kata “kosong” (King, 2013), karena maknanya yang ambigu dan kompleks. Meskipun pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian dari kebijakan global selama seperempat abad terakhir, masih ada perdebatan kontroversial mengenai makna istilah tersebut dan implikasi praktisnya (Fischer *et al.*, 2017). Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan ini agar keberlanjutan tidak hanya dijadikan sebagai slogan, namun dapat diimplementasikan secara nyata.

Untuk menjawab kompleksitas tersebut diperlukan pendekatan yang bertahap dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan. Yudarwati & Gregory (2022) mengidentifikasi terdapat 5 tahap dalam proyek pembangunan berkelanjutan. Tahapan tersebut menekankan pentingnya perencanaan hingga mencapai pada tahap keberlanjutan jangka panjang. Lima tahap tersebut, sebagai berikut:

a. Tahap Pra Inisiasi

Secara sederhana, tahap ini menggambarkan proses membangun kesadaran dan mengeksplorasi situasi dan kondisi setempat. Dalam prosesnya, penting untuk mengetahui

pihak – pihak yang nantinya akan terlibat dalam studi kelayakan dan pengambilan keputusan untuk menciptakan upaya kolaboratif.

b. Tahap Inisiasi

Pada tahapan ini mencakup proses penyusunan rencana terkait aksi pembangunan berdasarkan kesepakatan bersama. Pada tahap ini, penting untuk menetapkan tujuan, alokasi sumber daya, dan merencanakan strategi implementasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal.

c. Tahap Adopsi

Tahap adopsi yaitu saat proyek sudah mulai diimplementasikan di tingkat komunitas. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program, bahkan memberikan berbagai bentuk pelatihan kepada masyarakat untuk mendukung pemeliharaan dan operasional dari suatu proyek yang sedang dibangun.

d. Tahap Transisi

Tahap ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek dengan fokus utama adalah membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta mempertahankan keberlangsungan proyek.

e. Tahap Keberlanjutan

Tahap ini merupakan tujuan akhir dalam tahapan pengembangan proyek. Memastikan manfaat jangka panjang dari suatu proyek dengan tetap mempertahankan manfaat ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus dipraktikkan melalui tahapan yang terstruktur dan inklusif. Implementasi SDGs di berbagai konteks lokal menuntut pendekatan

partisipatif dan berbasis proses. Hal ini bertujuan untuk memastikan proyek pembangunan benar-benar dicapai secara nyata dan berkelanjutan.

2.2 Komunikasi Keberlanjutan

Secara umum, komunikasi keberlanjutan merupakan proses untuk dapat membangun pemahaman bersama yang berfokus pada visi keberlanjutan. Pada dasarnya, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dimediasi secara simbolis, di mana manusia membangun realitas mereka berdasarkan persepsi dan pengalaman (Godemann & Michelsen, 2011, h.6). Komunikasi keberlanjutan dipahami sebagai suatu proses, di mana argumen, pilihan tindakan dan/atau posisi mengenai pembangunan sosial dibahas dengan melihat masa depan dari sudut pandang ekonomi, ekologi, sosial dan budaya (Voci & Karmasin, 2024).

Terdapat banyak tantangan saat mengomunikasikan keberlanjutan, terutama dalam melibatkan publik terkait ancaman, isu dan implikasi dari perubahan global. Isu keberlanjutan sulit dikomunikasikan karena banyak orang yang tidak memiliki pengalaman langsung dengan dampaknya. Singkatnya, topik ini sering kali bersifat abstrak, tidak terlihat dan kompleks, sehingga dampaknya tidak selalu langsung terasa (Godemann, 2021, h.19). Oleh karena itu, diperlukan pihak yang mampu menjelaskan, mengilustrasikan, dan mengajak masyarakat untuk ikut bertindak dalam isu keberlanjutan. Dalam konteks ini, komunikasi memiliki peran penting untuk mencapai pemahaman bersama tentang nilai – nilai sosial terkait keberlanjutan dan sasaran yang ingin dicapai (Newig *et al.*, 2013).

Idealnya, dalam komunikasi keberlanjutan, antara organisasi dengan publik harus menemukan solusi bersama (Devin & Lane, 2014). Hal ini dapat difasilitasi melalui dialog, yang mensyaratkan adanya kesetaraan di antara kedua belah pihak dan pembagian sumber informasi yang adil (Yudarwati, 2024), dengan tetap melibatkan para ahli di bidang tersebut (Godemann,

2021; Yudarwati, 2024). Pendekatan komunikasi keberlanjutan ini dapat dipahami melalui tipologi yang menggambarkan proses bergerak secara bertahap dari *defensive to transformative*. Sederhananya, diartikan sebagai suatu proses pergeseran dari sikap pasif ke aktif dalam menciptakan perubahan. Ketiga tipe tersebut memiliki perbedaan dalam arah aliran informasi, fungsi komunikasi, serta efektivitas komunikasi (Newig *et al.*, 2013). Tipe komunikasi keberlanjutan ini, antara lain:

a. *Communication about Sustainability* (CaS)

Communication about Sustainability merupakan proses di mana informasi, interpretasi, dan opini terkait isu keberlanjutan dipertukarkan dan diperdebatkan. Isu – isu ini dibingkai melalui komunikasi horizontal, mulai dari interaksi langsung hingga dimediasi oleh media massa. CaS membentuk persepsi publik dengan membingkai isu serta menyusun fakta, argumen, dan pemahaman bersama mengenai isu keberlanjutan, tujuan yang ingin dicapai, dan pihak – pihak yang bertanggung jawab untuk bertindak.

Efektivitas CaS ini dapat diukur melalui 3 indikator utama, meliputi seberapa besar perhatian yang diterima suatu isu dari media massa, siapa yang memiliki akses terhadap wacana dan dapat memengaruhi proses pembingkaihan isu, dan sejauh mana potensi pertukaran komunikasi antara berbagai ranah atau sub-sistem komunikasi. Hasil akhirnya adalah dapat menentukan apakah tindakan menuju pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan.

b. *Communication of Sustainability* (CoS)

Communication of Sustainability lebih bersifat instrumental atau manajerial. CoS mengedepankan aliran komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima, di mana pengirim

sudah memiliki tujuan tertentu. CoS bertujuan untuk menginformasikan dan mendidik individu serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam praktik keberlanjutan.

Fungsi utama dari CoS adalah untuk memberikan informasi sekaligus edukasi untuk meningkatkan keterlibatan sosial. Umumnya, pelaku yang melakukan tindakan tersebut dipegang oleh ilmuwan yang dinilai memiliki pengetahuan dalam penyampaian pesan mengenai isu keberlanjutan. Karena memiliki tujuan komunikasi yang jelas, efektivitasnya dapat diukur berdasarkan seberapa baik pesan diterima, dipahami dan mempengaruhi perilaku. Namun, model komunikasi ini semakin banyak dikritik, karena pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku dinilai kurang efektif, sehingga muncul dorongan dari banyak pihak untuk mengutamakan dialog dan diskusi.

c. *Communication for Sustainability* (CfS)

Communication for Sustainability menekankan pada aspek normatif dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi atau peningkatan kesadaran, lebih jauh adalah untuk mendorong transformasi sosial. Pendekatan ini menggabungkan elemen dari CaS dan Cos, termasuk dalam menghasilkan pengetahuan, pembelajaran sosial, serta pengembangan solusi berkelanjutan secara kolaboratif. Efektivitas dari CfS dapat diukur melalui dampak nyata dalam tindakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan ini berguna sebagai alat analisis untuk memahami berbagai proses komunikasi yang terjadi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai tujuan akhir di tahap keberlanjutan atau *Communication for Sustainability* (CfS), prosesnya harus bertumpu pada masyarakat dengan proses yang berkelanjutan, sebagai

bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendekatan dengan cara yang bukan *Business as Usual* (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, h.252).

Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan partisipatori menjadi penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan perubahan. Dalam hal ini, komunikasi keberlanjutan tidak hanya menyampaikan visi, melainkan mengajak masyarakat lokal, pemangku kepentingan dan berbagai aktor terkait untuk dapat berperan aktif dari proses perencanaan hingga keberlanjutan proyek. Bagian selanjutnya akan membahas mengenai lebih lanjut mengenai pendekatan partisipatori dan pemberdayaan yang mendukung proses ini.

2.3 Pendekatan Partisipatori dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang telah direncanakan dan dikehendaki oleh masyarakat yang terwujud dalam bentuk keputusan – keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan (Harun & Ardianto, 2017, h.249). Selama ini, perspektif yang berpusat pada organisasi dikritik karena dianggap gagal dalam mempertimbangkan kepentingan publik sebagai hal yang penting (Yudarwati & Gregory, 2022). Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian informasi yang bersifat *top – top – bottom*, dari pemerintah pada masyarakat luas. Sebaliknya, pendekatan yang lebih efektif adalah *bottom – up*, di mana masyarakat dapat secara aktif berdiskusi, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan mereka, serta mengambil keputusan secara kolektif (Harun & Ardianto, 2017).

Sudah sepantasnya, masyarakat dipandang sebagai pelaku utama, dan bukan hanya objek dalam pelaksanaan pembangunan (Servaes, 2007; Yudarwati & Gregory, 2022). Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh seluruh elemen, termasuk masyarakat agar memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa tanggung jawab) terhadap pelaksanaan

pembangunan itu sendiri (Harun & Ardianto, 2017, h.249). Perubahan saat ini mencakup proses perubahan sosial yang sifatnya partisipatif, terutama dalam ranah masyarakat yang meliputi aspek sosial budaya setempat, di samping aspek ekonomi (Melkote, 2018).

Titik awal untuk memulai komunikasi keberlanjutan adalah melalui strategi pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk dapat melibatkan orang – orang secara aktif untuk mengubah dan memengaruhi kehidupan mereka sendiri (Godemann, 2021, h.9). Dengan adanya komunikasi yang efektif selama proses komunikasi keberlanjutan, dapat membantu meningkatkan respons yang lebih tinggi, partisipasi publik, memperluas pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas publik menuju transformasi sosial (OECD, 2020; Yudarwati, 2024). Secara umum, metode partisipasi dapat diartikan sebagai forum pertukaran dengan tujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan dan kelompok kepentingnya lainnya (Godemann, 2021, h.191).

Penelitian ini mengadopsi model dari Yudarwati & Gregory (2022) yang menggambarkan model komunikasi proyek pembangunan yang menawarkan pendekatan yang berpusat pada publik. Dalam model tersebut menunjukkan bagaimana kepemilikan dan pemberdayaan berjalan beriringan dalam pendekatan komunikasi yang melibatkan masyarakat secara progresif. Adapun model komunikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Informing* (Memberi Informasi)

Tahap pertama yang dilakukan adalah memberi informasi, seperti manfaat, tujuan dan rencana yang sudah dirancang. Komunikasi dalam tahapan ini bersifat satu arah, di mana masyarakat sebagai penerima informasi. Pemberi informasi menjelaskan terkait dengan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan.

b. *Involving* (Pelibatan Masyarakat)

Tahap ini menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi proyek. Proses komunikasi sudah berubah menjadi dua arah, di mana peran masyarakat sangat diperlukan dalam diskusi sampai pada pembuatan keputusan. Sudah mulai terlihat bahwasanya terdapat adanya pergeseran dari pendekatan *top – down* menjadi lebih partisipatif.

c. *Consulting* (Konsultasi)

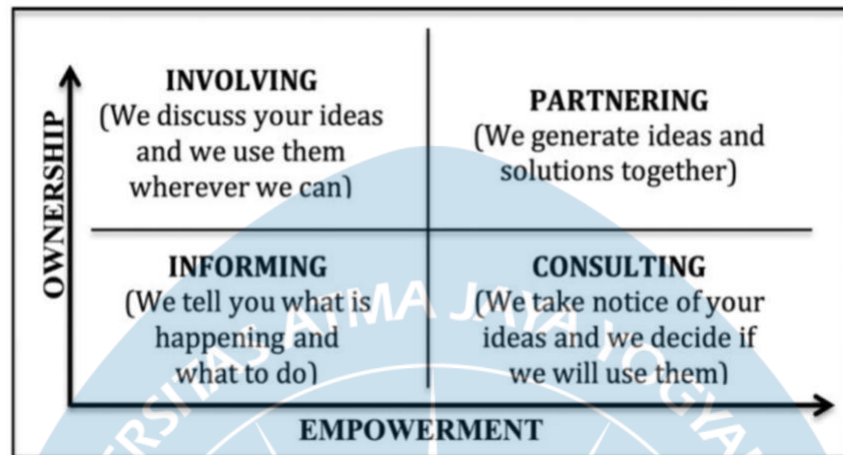
Di tahap konsultasi ini, masyarakat sudah mulai diajak untuk memberikan ide atau pendapat mereka kepada pihak yang berwenang atau pemberi informasi. Dalam tahap ini, pemberi informasi akan mempertimbangkan dan memutuskan segala ide atau informasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Pada tahap ini sudah mulai terbentuk proses komunikasi, karena terdapat dialog antara pemberi dan penerima informasi.

d. *Partnering* (Kemitraan)

Dari ketiga tahap yang sudah dilalui, diakhiri dengan tahap *partnering* atau kemitraan. Pada tahap ini sudah dapat menghasilkan ide dan solusi bersama dari dua belah pihak yang nantinya akan diimplementasikan pada proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Masyarakat sudah menjadi mitra dalam proyek, tidak lagi hanya menjadi penerima informasi atau manfaat. Dalam tahap ini tetap adanya dukungan dan pengawasan dari pihak terkait.

Singkatnya, model ini menggambarkan bahwa peranan komunikasi mengalami perubahan. Awalnya, komunikasi yang dilakukan berbasis pada memberi informasi kepada masyarakat sebagai penerima informasi, dengan memposisikan dari atas ke bawah (*top-down*), melalui tahap konsultasi di mana diikuti dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk dapat

berkontribusi dan terlibat aktif, hingga pada akhirnya mencapai tahap bermitra, ketika masyarakat sudah memiliki kesiapan dan keterampilan yang memadai (Yudarwati & Gregory, 2022).



Gambar 1. Model Komunikasi Kepemilikan dan Pemberdayaan
(Yudarwati & Gregory, 2022).

Model tersebut menekankan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin besar juga rasa kepemilikan masyarakat terhadap suatu proyek pembangunan. Dalam konteks ini, penelitian ini menambahkan bahwa terdapat beberapa metode partisipasi yang dapat digunakan untuk mendukung setiap tahapan dalam model tersebut. Merujuk pada Godemann (2021), terdapat berbagai metode partisipasi baru dalam konteks komunikasi antara berbagai pihak. Metode ini memiliki kesamaan dalam menawarkan struktur untuk berkomunikasi di antara kelompok dengan bergantung pada situasi politik dan sosial setempat.

Komunikasi dan keterlibatan masyarakat menjadi dua faktor utama yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan sebagian besar proyek pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, partisipasi menjadi kata kunci dalam wacana pembangunan dan sering dianggap sebagai pendekatan yang menjanjikan dan sah untuk diimplementasikan dalam pembangunan berkelanjutan (Rogers, 1976). Pentingnya partisipasi ini juga sejalan dengan kebutuhan akan pendekatan transdisipliner yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari akademisi, praktisi

komunikasi, tenaga ahli teknis, pembuat kebijakan, hingga masyarakat sipil dan komunitas lokal. Pendekatan diperlukan untuk menciptakan pemahaman dan solusi bersama (Servaes & Lie, 2015).

Beberapa metode partisipasi tersebut, antara lain:

a. *Mediation/Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Metode ini dirancang untuk menghindari sengketa hukum dan kasus pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik interpersonal dan bisnis, termasuk proyek – proyek yang relevan dengan lingkungan dan infrastruktur. Dalam konflik yang kompleks, mediator yang netral dan kompeten dibutuhkan untuk dapat memberikan mediasi dalam membantu pihak – pihak yang berkonflik, lebih dari itu metode ini menjanjikan untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak melalui pendekatan *win – win solution*. Keberhasilannya bergantung pada kesediaan kedua belah pihak yang terlibat untuk berdialog dan bernegosiasi secara konstruktif.

Jika dikaitkan pada konteks pembangunan berkelanjutan, mediasi berperan membuka ruang komunikasi terbuka antara berbagai belah pihak yang berkepentingan karena sering kali perencanaan terkait pembangunan menimbulkan konflik, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan infrastruktur. Mediator berperan memastikan inklusif, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

b. *Stakeholder Dialogue*

Dialog pemangku kepentingan merupakan komunikasi yang terstruktur yang di dalamnya melibatkan berbagai kelompok yang berkepentingan terhadap suatu kegiatan perusahaan. Pendekatan ini menjadi bagian dari kebijakan perusahaan, khususnya perusahaan multinasional. Spektrumnya berkisar dari dialog lingkungan dengan masyarakat lokal

hingga dialog di seluruh industri dengan LSM. Dialog pemangku kepentingan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan keterlibatan dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan berkelanjutan. Metode ini juga dinilai sejalan dengan konsep kooperatif, di mana bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara perusahaan dan masyarakat untuk mengurangi resiko konflik dalam praktik keberlanjutan yang dilakukan. Namun, kritik terhadap metode ini yakni perlu memastikan lebih lanjut apakah dialog ini benar – benar diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, atau hanya menjadi strategi hubungan masyarakat untuk menjaga reputasi perusahaan.

c. *Round Table*

Metode meja bundar merupakan pendekatan partisipatif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks melalui negosiasi yang berorientasi konsensus. Mereka dapat menyampaikan pandangan dan mencari solusi yang bersifat objektif. Metode ini menjanjikan untuk mengoordinasi tindakan para aktor yang heterogen menuju tujuan bersama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, metode ini sangat diperlukan dalam perencanaan infrastruktur skala besar serta pengambilan keputusan strategis atas dasar kesepakatan bersama. Dengan memberikan ruang terbuka untuk berdialog, metode ini bisa menjadi salah satu partisipasi kolaboratif yang dapat meningkatkan keberlanjutan keputusan pembangunan.

d. *Cooperative Discourse*

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan ketidakpastian kognitif dan ambivalensi normatif tinggi. Dalam metode ini, pluralisme pengetahuan, nilai dan kepentingan yang umum di banyak bidang teknologi dan lingkungan dapat dianalisis dalam prosedur 3 langkah. Jika diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prosesnya

dapat berupa pertama, analisis pohon nilai, di mana pemangku kepentingan akan menyampaikan pandangan mereka terkait rencana yang akan diusulkan. Kedua, para ahli dari berbagai disiplin ilmu akan memberikan wawasan dan pengetahuan mereka yang berhubungan dengan rencana atau kebijakan tersebut, termasuk dengan dampak atau konsekuensinya. Ketiga, ketika masyarakat sudah mengetahui pengetahuan dan konsekuensi dari tindakan tertentu, nantinya akan menciptakan sebuah forum di mana masyarakat dapat mendiskusikan dan mempertimbangkan kembali segala nilai serta konsekuensi dari tindakan yang diambil. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang jauh lebih demokratis dan inklusif, karena mempertimbangkan berbagai perspektif dan membantu dalam menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh banyak pihak.

e. *Consensus Conference*

Konferensi konsensus merupakan metode partisipasi yang melibatkan panel warga negara untuk mendiskusikan isu kontroversial. Peserta dipilih secara representatif diberikan kesempatan untuk dapat memahami topik yang dibahas, bertanya kepada para ahli dan kemudian di akhir proses diskursif ini mereka membuat pernyataan publik yang menyampaikan kesimpulan mereka kepada para pembuat keputusan. Meskipun berorientasi pada konsensus, pandangan minoritas tetap disuarakan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, metode ini memungkinkan mendorong partisipasi aktif dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

f. *Planning Cells/Citizens Reports*

Metode ini hampir sama dengan *consensus conference*, namun secara garis besar fokus pembahasan, proses dan tujuannya berbeda. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk

mendorong demokratisasi dalam proses perencanaan. Dalam praktiknya sama seperti *consensus conference*, namun hasil akhirnya adalah menciptakan keputusan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Tidak hanya itu, rekomendasi yang dihasilkan dari proses ini memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan mengenai preferensi masyarakat, serta solusi yang lebih dapat diterima dan bersifat keberlanjutan.

g. *Future Workshop*

Metode ini berfokus pada pengembangan ide – ide kreatif di masa depan untuk membantu masyarakat membayangkan bagaimana mereka ingin hidup, bekerja, dan bertindak di masa depan melalui 3 tahapan, yaitu refleksi kritis terhadap kondisi saat ini, mengembangkan skenario masa depan pada fase imajinasi atau utopia dan perencanaan implementasi atau fase praktik. Dua fase pertama, peserta didorong untuk membebaskan diri dari segala batasan dengan menggunakan imajinasi mereka, dan di fase ketiga mereka akan mendapatkan masukan dari para ahli. Lokakarya ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam merancang masa depan yang lebih baik dan mengembangkan solusi kreatif dan inovatif untuk masalah yang menyertai proyek – proyek baru.

h. *Scenario Workshop*

Metode ini awalnya dikembangkan untuk perencanaan strategis dalam ranah militer dan ekonomi, metode ini mulai dipraktikan dalam konteks partisipasi publik untuk meramalkan dan merencanakan skenario masa depan. Proses partisipasi ini bukan tentang masa depan yang dapat dibayangkan. Perlu adanya pelibatan integrasi berbagai pengetahuan dan pengalaman, merefleksikan secara kritis nilai – nilai dan preferensi dalam diskusi dan kemudian baru mengembangkan bersama terkait tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, lokakarya skenario ini juga berkontribusi pada pembelajaran sosial, artinya masyarakat

dapat berbagai perspektif sekaligus memperkaya pemahaman kolektif terkait perkembangan masa depan. Dengan demikian, metode ini dapat berperan sebagai sarana yang tidak hanya merancang tindakan strategis, melainkan membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

i. *eParticipation*

Metode ini hadir karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menciptakan akses yang lebih besar terhadap partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Metode ini memungkinkan menyampaikan informasi menjadi lebih mudah melalui forum diskusi *online* antara warga dengan para ahli untuk dapat berdiskusi dan bertukar pendapat tanpa harus hadir secara fisik. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, namun penerapannya harus digunakan bersamaan dengan metode partisipasi lainnya agar lebih inklusif dan efektif.

Berdasarkan uraian terkait dengan metode partisipasi, dapat disimpulkan bahwasanya transparansi dalam ranah musyawarah dan partisipasi menjadi penting dalam memastikan efektivitas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Godemann, 2021) karena setiap pihak merasa didengar dan memiliki kepercayaan terhadap hasil yang dicapai. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendekatan partisipatif yang ada ataupun yang baru ini memiliki potensi besar untuk mengidentifikasi dan membentuk solusi keberlanjutan. Dengan melibatkan seluruh pihak membantu untuk menghasilkan keputusan yang lebih inklusif (Godemann, 2021).

Penelitian ini mengadopsi perspektif komunikasi pembangunan sebagai sumber pelengkap. Komunikasi pembangunan dituntut untuk bisa memahami konteks *glocal* (*globalization and*

local). Tidak hanya berfokus pada globalisasi (mendunia), tetapi harus berintegrasi dengan konteks lokal (Harun & Ardianto, 2017). Dengan kata lain, perspektif internasional saja tidak cukup, diperlukan perspektif lokal yang lebih relevan diterapkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penggunaan dialog dalam bahasa lokal yang dikombinasikan dengan pengetahuan lokal menjadi penting untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan (Yudarwati & Gregory, 2022). Seperti yang dinyatakan Presiden Julius K.Nyerere (dalam Tanganyika Africa National Union, 1971) : “Jika pembangunan harus memberi manfaat bagi rakyat, rakyat harus berpartisipasi dalam mempertimbangkan, merencanakan dan mengimplementasikan rencana pembangunan mereka” (Rogers, 1976).

Oleh karena itu, integrasi nilai dan pengetahuan lokal penting dalam metode partisipasi, tidak hanya diperuntukkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar – benar dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.

2.4 Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pada konsep pembangunan, kebudayaan berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan sistem tradisional dan modern dengan mengikutsertakan masyarakat di tingkat akar rumput secara aktif dalam program pembangunan (Harun & Ardianto, 2017, h.234). Untuk dapat mewujudkan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya dalam konteks Indonesia, diperlukan pendekatan transdisipliner karena sebagian masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan kearifan lokal yang berkontribusi untuk mempengaruhi pola dan perilaku masyarakat (Rejeki & Pranata, 2024). Hal ini sejalan dengan peran komunikasi keberlanjutan yang bertujuan menghasilkan pengetahuan dari perspektif interdisipliner atau transdisipliner, kemudian membawanya ke dalam diskusi publik (Godemann, 2021). Oleh karena itu, pendekatan transdisipliner penting dalam mempertimbangkan

perspektif non – ilmiah, termasuk nilai – nilai lokal, sehingga sifatnya lebih terbuka dari pandangan non – ilmiah (Godemann, 2021; Rejeki & Pranata, 2024).

Masyarakat adat memiliki keterkaitan atau hubungan timbal balik dengan alam, daripada memandang alam sebagai sesuatu yang ada untuk melayani manusia, seperti yang selama ini dianggap oleh sebagian besar budaya modern. Pemikiran, intuisi, dan praktik masyarakat adat disebut kearifan lokal atau pengetahuan lokal (Abas *et al.*, 2022). Kearifan lokal mencakup pengetahuan, praktik, nilai – nilai dan kekayaan intelektual dari generasi ke generasi dalam masyarakat lokal (Lestari *et al.*, 2024; Nurhasan, 2023). Sebagai bentuk pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun, kearifan lokal dipandang berhasil dan telah teruji oleh waktu, sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan (Wanadjaja & Samputra, 2021).

Nilai – nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bersifat universal, sehingga selaras dengan prinsip – prinsip global, terutama dalam mengembangkan keberlanjutan lingkungan (Nurhasan, 2023). Konsep ini juga sejalan dengan prinsip “berpikir lokal, bertindak global” (Godemann, 2021) yang menekankan pentingnya nilai lokal untuk mencapai tujuan global. Kearifan lokal dari suatu masyarakat atau dari suatu daerah sangat penting dalam proses pemberdayaan dan pembangunan (Peters & Wardana, 2013). Selain itu, kearifan lokal juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dalam konteks lingkungan dan pembangunan (Lestari *et al.*, 2024).

Tri Hita Karana merupakan salah satu kearifan lokal yang masih berkembang dan menjadi pedoman hidup masyarakat Bali dalam mencapai keberlanjutan. Gagasan *Tri Hita Karana* menjiwai kehidupan masyarakat Bali (Wanadjaja & Samputra, 2021). Konsep ini didasarkan pada prinsip keseimbangan atau harmoni dalam kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan

(*parahyangan*), hubungan antar sesama manusia (*pawongan*) dan hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Sukarma, 2016).

Implementasi *Tri Hita Karana* di Bali bersifat unik, karena filosofinya berpadu dengan nilai – nilai dan kearifan budaya setempat. Masa depan Bali sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan filosofi *Tri Hita Karana* dalam seluruh aspek kehidupan dan di semua tingkatan masyarakat (Peters & Wardana, 2013). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terdapat berbagai tantangan yang sering ditemui di lapangan, seperti eksploitasi sumber daya alam, konflik sosial, hilangnya nilai – nilai lokal akibat modernisasi dan kurangnya aspek spiritualitas dalam pembangunan. Oleh karena itu, konsep *Tri Hita Karana* dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Lebih dari itu, *Tri Hita Karana* dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan lokal (Kristinayanti *et al.*, 2025).

Dengan berpegang pada konsep *Tri Hita Karana*, pembangunan dapat diarahkan menuju keberlanjutan yang selaras dengan tujuan SDGs yang seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan (Lestari *et al.*, 2024). *Tri Hita Karana* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan mencakup banyak dimensi dibandingkan dengan model pembangunan Barat, seperti *Triple Bottom Line* dan ini menjadi kesempatan untuk dapat mempromosikan kearifan lokal dalam pencapaian SDGs, meskipun masih dihadapkan dengan berbagai tantangan (Wanadjaja & Samputra, 2021)

Pendekatan transdisipliner dalam penelitian ini berupaya memaknai kearifan lokal, khususnya *Tri Hita Karana* sebagai landasan dalam komunikasi keberlanjutan. *Tri Hita Karana* diposisikan sebagai kerangka komunikasi yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan

tujuan global, terutama dalam sektor pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, *Tri Hita Karana* tidak hanya dijadikan sebagai identitas dari masyarakat Bali, melainkan sebagai instrumen dalam memperkuat partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

2.5 Kerangka Pemikiran

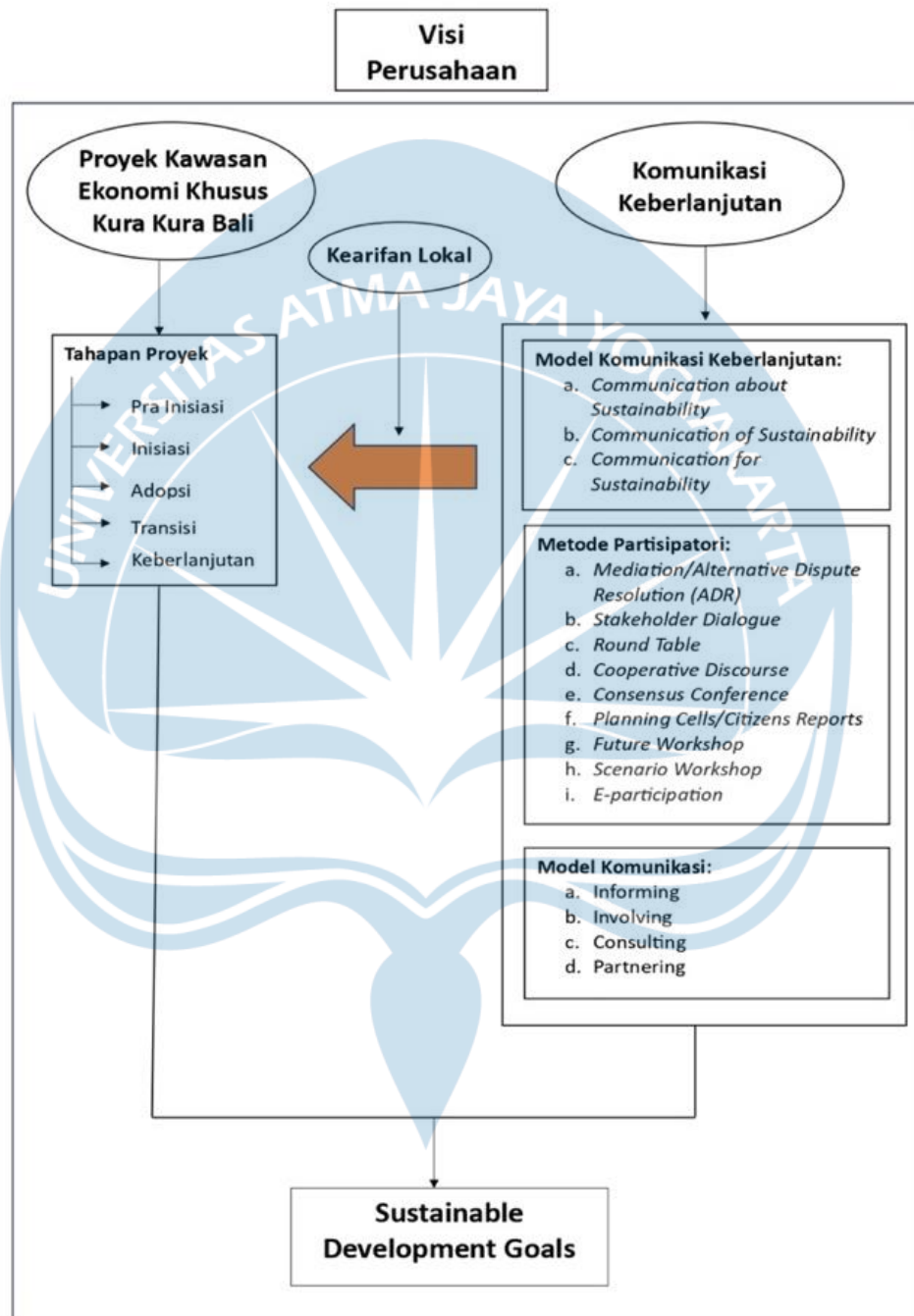
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan komunikasi keberlanjutan, yang meliputi pendekatan partisipatori dan pemberdayaan dalam pembangunan KEK Kura Kura Bali. Pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai proses eksplorasi, pembelajaran dan pembentukan masa depan masyarakat yang melibatkan komunikasi untuk dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang tindakan yang harus diambil (Newig *et al.*, 2013). Komunikasi berperan penting sebagai jembatan untuk meneruskan visi dari perusahaan yakni PT BTID kepada masyarakat.

Komunikasi keberlanjutan merupakan proses membangun pemahaman bersama yang berfokus pada visi keberlanjutan. Pada dasarnya, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dimediasi secara simbolis, di mana manusia membangun realitas mereka berdasarkan persepsi dan pengalaman (Godemann & Michelsen, 2011, h.6). Pendekatan yang digunakan dalam mengomunikasikan keberlanjutan pada penelitian ini yakni dengan memahami bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam berbagai tahap. Penelitian ini mengadopsi model dari Yudarwati & Gregory (2022), yang mengidentifikasi tahapan proyek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari tahap pra inisiasi, inisiasi, adopsi, transisi dan keberlanjutan. Model ini sejalan dengan model komunikasi keberlanjutan dari Newig *et al.* (2013), yang digunakan oleh organisasi. Model tersebut mencakup, *communication about sustainability*, *communication of sustainability* dan *communication for sustainability*, yang menggambarkan proses bergerak secara bertahap dari *defensive to transformative*.

Titik awal untuk memulai komunikasi keberlanjutan adalah melalui strategi pemberdayaan. Tujuannya untuk dapat melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengubah dan mempengaruhi kehidupan mereka (Godemann, 2021, h.9). Metode partisipasi diartikan sebagai forum pertukaran dengan tujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya (Godemann, 2021, h.191). Peneliti juga mengadopsi model dari Yudarwati & Gregory (2022), yang menggambarkan bagaimana kepemilikan dan pemberdayaan berjalan beriringan dalam pendekatan komunikasi yang melibatkan masyarakat secara progresif. Peneliti juga menambahkan model partisipasi baru yang dapat digunakan untuk mendukung setiap tahapan dalam model tersebut. Merujuk pada Godemann (2021), menjelaskan bahwa terdapat berbagai metode partisipasi baru dalam konteks komunikasi antara berbagai pihak.

Kearifan lokal berperan penting dalam komunikasi keberlanjutan. Nilai – nilai dalam kearifan lokal bersifat universal dan selaras dengan prinsip – prinsip global dalam mengembangkan keberlanjutan lingkungan (Nurhasan, 2023). Konsep ini mendukung prinsip “berpikir lokal, bertindak global” (Godemann, 2021) yang menekankan pentingnya nilai lokal untuk mencapai tujuan global.

Untuk membantu dalam memahami alur dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan kerangka konsep yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
(Sumber: diolah oleh peneliti, 2025)